

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena perkembangan pemerintahan di Indonesia saat ini adalah tuntutan akuntabilitas terhadap Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah. Tuntutan ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Dalam pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan salah satu aturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang diatur dalam undang-undang No. 24 Tahun 2005. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Baik pemerintah Pusat maupun Daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, pemerintah wajib merespon tuntutan akuntabilitas tersebut di atas.

Laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki haruslah memiliki keempat karakteristik kualitatif diatas sebagai prasyarat normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui, dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan adalah pengawasan intern. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Djalil, 2014). Semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Belu belakangan ini menunjukkan indikasi bahwa pengawasan internal belum berfungsi secara baik. Tahap pengawasan, seharusnya merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah pemahaman tentang peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi

manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan peraturan tentang akuntansi pemerintah dari Basis Kas ke Basis Akrua cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi.

Permasalahan penerapan Basis Akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (*pegawai*) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat ini. Dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang, instansi-instansi pemerintah sudah mulai meninggalkan sistem manual, beralih ke sistem komputer. Namun yang menjadi kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang

mungkin menjadi faktor penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen dari Pemerintah Daerah dalam hal ini merupakan keinginan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang dapat diandalkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut akan berdampak pada semakin baiknya kualitas dari informasi laporan keuangan. Pernyataan ini mendukung hasil penelitian Suwanda (2015), yaitu komitmen organisasi secara signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Fenomena buruknya kualitas informasi laporan keuangan daerah memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan, terlihat dari banyaknya pejabat yang terjerat kasus hukum dan dapat menimbulkan kerugian Negara/Daerah. Administrasi keuangan yang buruk tersebut berlangsung terus menerus tentu saja rakyat akan menanggung akibatnya. Tata kelola keuangan yang buruk menyebabkan ekonomi biaya tinggi, pelayanan kepada publik yang buruk, tingkat kerusakan fasilitas publik yang lebih cepat dan biaya transaksi yang tinggi. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan, dengan peningkatan kualitas SDM dan perbaikan peraturan dibidang manajemen keuangan daerah, menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, artinya organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dengan ukuran kualitas Laporan Keuangan seperti: Dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

Akan tetapi dari data Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Republik Indonesia Provinsi NTT yang diperoleh Dasar Opini yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu adalah Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 senilai Rp. 1.180.000.000.000. Dari nilai tersebut diantaranya senilai Rp. 677.200.000.000. Tidak didukung dengan rincian. Oleh karena itu BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait.

Opini BPK atas laporan keuangan ini menunjukkan bahwa adanya persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan, belum menggambarkan kondisi kekayaan yang sebenarnya. Kondisi ini jelas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah seperti: a. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), b. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, c. Peranan Audit Internal, d. Sumber Daya Manusia (SDM), dan e. Sistem Pengendalian Intern (SPI). Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan daerah, sangat penting bagi penulis dalam menilai pengelolaan keuangan Kabupaten yang dijalankan mampu mewujudkan pembangunan serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor – Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 (Studi Empiris Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu)**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor–faktor apa saja yang menjadi penentu kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk Mengetahui faktor – faktor penentu kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Kabupaten Belu

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah kabupaten di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Pengelolaan Keuangan pemerintahan kabupaten belu.

b) Bagi Masyarakat Kabupaten Belu

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang Pengelolaan Keuangan oleh Pemerintah kabupaten belu.

c) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan serta pandangan akademis.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar perbandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.